

DAFTAR RUJUKAN

BUKU:

- Ali, Z. (2019). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, S. (2012). *Konversi Tanah dan Air*. Bogor: IPB Press.
- Atmadja, G. I D., & Budiarta, P. I N. (2018). *Teori – teori Hukum*. Setara Press.
- Budiono, H. (2014). *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya.
- Djulaeka, Rahayu Sari. (2019). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka.
- Effendie, B. (2011). *Pendaftaran Tanah di Indonesia Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Alumni: Banjarmasin.
- Faudy, M. (2013). *Teori – teori besar dalam hukum (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Hardjowigeno, S. (2015). *Ilmu Tanah*. Jakarta: Akademia Pressindo.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Johanes, G. (2011). *Kajian Ilmu Hukum Tentang Kebebasan Berkontrak, Dalam Butir-Butir Pemikiran dalam Hukum, Memperingati 70 Tahun Prof. Dr. B. Arief Sidharta, S.H.* Bandung: Refika Aditama.
- Limbong, Bernhard. (2011). *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*. Jakarta : CV Rafi Maju Mandiri.
- Metrokusumo, S. (2014). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Cahaya Atmaja.
- Muhammad, A. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya.

- Poerwadarminta, W.J.S. (2012). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- R. Subekti, & R. Tjitrosudibio. (2016). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sahnan. (2016). *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral Dan Keadilan*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2013). *Hukum Agraria*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Santoso, U. (2015). *Perolehan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana.
- Setiawan, I. O. (2015). *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak, R. (2011). *Hukum Kontrak*. Jakarta: Kontan Publishing.
- Soerodjo, I. (2014). *Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Sumaryadi, Made. (2012). *Landasan Yuridis Penguasaan Tanah Negara yang ada di Wilayah Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng*, Universitas Panji Sakti Singaraja.
- Sutedi, A. (2016). *Peralihan hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wibawanti, S. & Murjiyanto. (2013). *Hak Atas Tanah & Peralihannya*. Yogyakarta: Liberty Yogya.
- Wiguna, I Gusti Ngurah Tara. (2011). *Hak-Hak Atas Tanah pada masa Bali Kuna Abad X-XI Masehi*. Denpasar: Udayana University Press.

JURNAL/ARTIKEL:

- Andriyani, Komang & Surata, I Gede. (2016). *Pendaftaran Tanah Secara Rechts Kadaster Melalui Proses Konversi (Studi Kasus Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)*. *Jurnal Hukum*. 4(2), 89-112.
- Ansori, Lutfil. (2017). *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*. *Jurnal Yuridis*, 4(2).
- Budhayati, C. T. (2009). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian Di Indonesia. *Jurnal Widya Sari*, 10(3), 236.
- Budiwati, S. (2015). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perspektif Pendekatan Filosofis. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum*, 276-289.
- Cecilia, C. (2016). Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melakukan Pendaftaran Tanah Warisan "(Studi Pada Kantor Pertanahan Kota Stabat)". *Premise Law Journal*, 1-23.
- Elidar, C., & Fitriani, R. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Hak Milik Masyarakat Di Gampong Labuhan Keude Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Aceh Timur. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 247-259.
- Halim, H. (2018). Asas Keadilan Dalam Syarat Sahnya Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara & Bisnis*, 3(2).
- Hariato, D. (2016). Asas Kebebasan Berkontrak: Problematika Penerapannya Dalam Kontrak Baku Antara Konsumen Dengan Pelaku Usaha. *Jurnal Hukum*, 11(2), 145-156.

- Idria, I. (2007). Ketidakadilan Dalam Kebebasan Berkontrak Dan Kewenangan Negara Untuk Membatasinya. *Lex Jurnalica*, 4(2), 81.
- Larasati, A., & Raffles. (2020). Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia. *Zaaken Journal Of Civil And Bussiness Law*, 1(1),.
- Luthfi, M., & Khisni, A. (2018). Akibat Hukum Terhadap Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Lunas Pembayaranannya. *Jurnal Akta*, 5(1), 65-74.
- Mulyono, B. E. (2013). Pelaksanaan Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Kuasa Untuk Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris. *Jurnal Independent*, 1(2), 59-70.
- Novita, R. A. (2017). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) Di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo. *Diponegoro Law Journal*: 6(2), 4.
- Rosandi, B. H. P. (2016). Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 4(3), 423-435.
- Sari, I. (2020). Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (Uupa). *Jurnal Mitra Manajemen*, 9(1), 15-33.
- Sibuea, H. Y. P. (2016). *Penegakan Hukum Pengaturan Minuman Beralkohol*. *Negara Hukum*: 7(1), 130-131.
- Silviana, A. (2012). Kajian Tentang Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Melaksanakan Pendaftaran Tanah. *Pandecta Research Law Journal*, 7(1), 11-122.

Syahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak Dan Kedudukan Yang Seimbang Dari Debitor Dan Kreditor. *Makalah Yang Disampaikan Paada Seminar Ikatan Notaris Indonesia Di Surabaya Pada Tanggal 27 April 1993*, 2.

Triantika, N. A., Marwenny, E., & Hasbi, M. (2020). Tinjauan Hukum Tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui E-Commerce Menurut Pasal 1320 Kuhperdata. *Ensiklopedia Social Review*, 2(2), 119-131.

Wahyudi, S. T. (2012). Problematika Penerapan Pidana Mati Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 217-218.

Zainuddin. (2014). Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Dalam Kepemilikan Tanah Pada Badan Pertanahan Nasional (Bpn) Kabupaten Bintan (Studi Pada Desa Mapur Kecamatan Bintan Pesisir Kabupaten Bintan). *Artikel E-Journal*. 1-12.

TESIS:

Susiati, D. (2019). Status Hukum Hak Milik Atas Tanah Yang Terkena Abrasi (Doctoral dissertation, Universitas 17 Agustus 1945).

SKRIPSI:

Ananta, Gede Tomy. (2020). Implementasi Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Studi Kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng).

Balqis, F. (2020). Pelaksanaan Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Di Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang.

Kusuma, Jalu Akbar. (2018). Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah. (Studi Kasus Di Kampung Pulo, Bekasi Selatan)

Pradipta, I Kadek Krisna. (2021). Peranan Kantor Pertanahan Kabupaten Karangasem Terhadap Sengketa Pensertifikatan Tanah Ditinjau Berdasarkan Uu No 5 Tahun 1960/Undang-Undang Pokok Agraria Di Desa Adat Padangbai (Studi Kasus Sengketa Pensertifikatan Tanah Antara PT ASDP Dengan Desa Adat Padangbai).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Lembaran Negara Republik Indonesia, No 75, 1959.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2043.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesia).

INTERNET

Baliprov.go.id. (2022). *Tata Ruang Provinsi Bali*.

<https://tarubali.baliprov.go.id/buleleng/>. Diakses tanggal 26 juli pukul

09.36 wita